

Judul : Kader Hanura curigai ada manipulasi hasil rapat BAKN
Tanggal : Senin, 18 Februari 2013
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6



Abdilla Fauzi Ahmad

KESIMPULAN rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dengan Kementerian Kesehatan, PT Bio Farma, dan Rektorat Universitas Airlangga di Gedung DPR Kamis (7/2), mendapat penolakan dari Fraksi Hanura.

Menurut anggota BAKN dari Fraksi Hanura, Abdilla Fauzi Ahmad, kesepakatan BAKN meminta dana tambahan untuk melanjutkan pembangunan pabrik vaksin flu burung, tidak benar.

"Hasil rapat itu benar-benar telah menyimpang dari tujuan semula," katanya kepada *Rakyat Merdeka* kemarin, kemarin.

Sebelum meminta dana tambahan, kata anak buah Jenderal (purn) Wiranto ini, semestinya BAKN mendesak agar dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung diusut lebih dulu.

Dia mengingatkan, potensi kerugian negara akibat proyek pabrik vaksin flu burung untuk manusia itu lebih besar ketimbang pembangunan Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"BAKN menerima laporan dari masyarakat terkait lambannya proses kasus proyek vaksin flu burung ini, menyebabkan timbulnya potensi kerugian negara yang lebih besar," jelasnya.

Fauzi menegaskan, proyek lab vaksin flu burung tiba-tiba muncul entah dari mana, tidak ada perencanaannya sama sekali, tapi dianggarkan Rp 1,4 triliun. Akibatnya, potensi ke-

rugian negara menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak kurang dari Rp 600 miliar.

"Ini sebuah skandal dalam politik anggaran kita. KPK harus menindaklanjuti dengan serius dan menghukum pihak-pihak yang terlibat," imbuh dia.

BAKN DPR, lanjut Fauzi, telah menyampaikan Laporan Hasil Penelaahan atas Penguasaan sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk manusia pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2008-2011 pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 11 September 2012.

Karena itu, BAKN DPR sesuai alur tata kerjanya, akan mengagendakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut.

"Sehingga diharapkan saat rapat dengan Menteri Kesehatan akan ada pendalaman atas tindak lanjut dan fakta-fakta (hukum) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dimaksud," tutur dia.

Dia juga mendorong KPK agar menuntaskan kasus ini. Pasalnya, potensi kerugian negara akibat proyek sangat besar. "Sebagaimana Hambalang, BAKN berupaya untuk tetap fokus menyelesaikan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik," pungkas Fauzi.

Diketahui, kesimpulan BAKN itu dibuat dengan hanya tiga dari sembilan anggota BAKN yang tersisa di dalam ruangan. Selain Sumarjati, masih ada Kamaruddin Syam dari Fraksi Partai Golkar, dan Yahya Sacawirya dari Fraksi Partai Demokrat.

Beberapa anggota BAKN DPR memilih meninggalkan rapat sebelum selesai dengan alasan ada kegiatan lainnya, seperti Teguh Juwarno dari PAN dan Eva Kusuma Sundari dari PDI Perjuangan.

Saat rapat Kamis kemarin, Ketua BAKN DPR, Sumarjati Arjoso, dari Fraksi Partai Gerindra, mengatakan pihaknya menilai pantas bila proyek dilanjutkan. ■ QAR

Kader Hanura Curigai Ada Manipulasi Hasil Rapat BAKN

PERPUSTAKAAN
DPR-RI